

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada orde reformasi ini Bangsa Indonesia sedang menghadapi gelombang besar berupa meningkatnya tuntutan demokratisasi, desentralisasi dan globalisasi. Sekalipun keadaan serupa pernah terjadi pada beberapa kurun waktu yang lalu namun tuntutan saat ini sangat mengandung nuansa yang sangat berbeda sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut, salah satu prasyarat yang perlu dikembangkan adalah memegang komitmen yang tinggi untuk menerapkan nilai-nilai luhur dan prinsip tata kelola dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Setiap organisasi baik organisasi publik ataupun organisasi privat tentu membutuhkan pegawai sebagai tenaga kerjanya guna mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Pegawai merupakan aset yang paling penting dalam kemajuan organisasi maka dari itu banyak hal yang perlu diperhatikan terkait dengan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas yang diemban untuk meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan reputasi organisasi dipersepsi masyarakat yang luas dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance*, merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka itu, diperlukan para pegawai sebagai pengemban dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan absah, sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan secara berdayaguna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN (Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme). Penyelenggaraan pemerintah tersebut memerlukan pertanggungjawaban sebagai wujud komitmen pemerintah untuk bersikap transparan dengan mengungkapkan pelaksanaan mandat/amanah yang telah diterimanya, Akuntabilitas merupakan salah satu jawaban untuk mewujudkan pertanggung jawaban tersebut.

Berbicara mengenai akuntabilitas, terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan, terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Dalam konteks ini, akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan untuk mencapai tujuan. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup pula praktek-praktek kemudahan bagi pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung, baik secara lisan maupun tulisan.

Tumpuan dan harapanpun tentunya mengalir tertuju pada aparatur pemerintah daerah mengingat mereka merupakan wakil dari pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dituntut aparatur pemerintah yang akuntabel. Pentingnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sejalan dengan Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Presiden menginstruksikan kepada : Para Menteri, Panglima TNI, Gubernur BI; Jaksa Agung; POLRI; Para Pimpinan LPND; Para Pimpinan Sekretariat Lembaga Negara; Para Gubernur; Para Bupati/Walikota, untuk melaksanakan akuntabilitas kinerjanya, sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Salah satu harapan masyarakat (selaku konsumen pelayanan) adalah menginginkan pelayanan yang cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Pertanggungjawaban kepala pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, pada hakekatnya merupakan perwujudan akuntabilitas publik

sebagai prasyarat mendasar bagi terciptanya pemerintahan yang baik. Terselenggaranya *good governance*, merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara.

Dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 104 antara lain tertulis sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“hendaklah ada diantara kamu (manusia) segolongan umat (elit power), yang mengajak kepada kebaikan, dan memerintahkan kepada kebenaran dan mencegah kemunkaran, dan itulah orang-orang yang beruntung”

Kata hendaklah diartikan sebagai suatu kewajiban, yang mutlak, segolongan umat artinya tidak semua rakyat masuk dan mempunyai kesempatan untuk memiliki kekuasaan menjadi pemerintah, mengajak kepada kebaikan artinya menghimbau orang lain rakyatnya untuk bermoral baik inilah yang kemudian disebut dengan *good governance*.

Kantor Kecamatan Cicendo Kota Bandung, merupakan satu Instansi Vertikal dengan tugas pokok dan fungsi yang cukup berat. Sebagai satu lembaga yang dekat dengan masyarakat nampak jelas pembentukan serta pembinaan moral, spiritual dan sikap yang baik merupakan bidang garapan utamanya sebagai tauladan bagi warganya. Dalam hal ini Kantor Kecamatan Cicendo Kota Bandung sebagai institusi pemerintah mempunyai tugas umum dalam pemerintahan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Sesuai dengan hasil perumusan pada rapat kerja di Kantor Kecamatan Cicendo Kota Bandung menghasilkan suatu visi sebagai berikut :

“Mewujudkan Kecamatan Cicendo Bersih, Santun, Tuntas dan Unggul (BERSATU)”.

Misi dari Kantor Kecamatan Cicendo Kota Bandung sebagai berikut:

“Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Cicendo melalui Membangun tata kelola pelayanan yang santun, inovatif, dan tepat waktu serta sinergitas dengan para pemangku kepentingan, serta membangun tata kelola keuangan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel”.

Pelaksanaan visi, misi dari kecamatan cicendo tersebut diperlukan penerapan prinsip-prinsip *good governance* guna meningkatkan roda pemerintahan tersebut. Adapun untuk melaksanakan sikap akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Cicendo diharuskan menjalankan seluruh program yang telah dijanjikan kepada publik. Sesuai dengan yang telah dijelaskan, berikut adalah data Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

Tabel 1.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cicendo Kota Bandung


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2014		2015								Capaian
			T	R	T 1	R	T 2	R	T 3	R	T 4	R	%
1	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	75	75.25							80	80.6	100,96
2	Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	70	97.01			98				98.30	89.68	91.23
4	Prosentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu	%	70	94.76			97				97.33	99.38	102.11
5	Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%	33	33.33							50	66.76	133.34
6	Prosentase RW Juara	%	35	35.71							44.64	44.64	100%
7	Prosentase Lembaga	%	66	66.6							66.67	66.67	100%

kemasyarakatan Aktif												
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kantor Kecamatan Cicendo tahun 2015.

Tabel 1.2

Predikat nilai capaian kerjanya

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100 %	Melebihi/Melampaui Target
2.	=100 %	Sesuai Target
3.	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Sumber : LAKIP Kantor Kecamatan Cicendo tahun 2015.

Tabel 1.3

Perjanjian Kinerja SKPD

Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2015

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80
		Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%	100

		Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI	Nilai	850
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	98,50
		Persentase pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu	%	97,33
		Persentase Kelurahan berkriteria Baik	%	50
		Persentase Kelurahan yang 100 % RW nya telah memenuhi Kriteria RW Juara	%	44,64
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	66,67
		Persentase Kelurahan yang telah memenuhi Rasio Anggota Linmas 1:1	%	1:1,01
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	60
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100

Sumber : LAKIP Kantor Kecamatan Cicendo tahun 2015.

Berdasarkan data tersebut, jika dilihat pada predikat nilai capaian kinerja, dan perjanjian kinerja dalam LAKIP Kantor Kecamatan Cicendo Kota Bandung, prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu belum mencapai target dan tidak sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disetujui. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kantor Kecamatan Cicendo Kota Bandung dirasa masih rendah, yang tentunya akan berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan ataupun dalam memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat sehingga diduga hal tersebut karena kurangnya sikap akuntabilitas kinerja di Kantor Kecamatan Cicendo Kota Bandung, ditandai oleh dimensi Akuntabilitasnya yaitu : akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas financial.

Bertitik tolak pada permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai akuntabilitas kinerja yang dipengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada Kantor Kecamatan Cicendo Kota Bandung, dengan judul: **“PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR KECAMATAN CICENDO KOTA BANDUNG”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka ditemukan berbagai permasalahan yang menyangkut dengan kurangnya Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Terhadap Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Cicendo Kota Bandung sesuai dengan hasil observasi dilapangan, adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran kinerja kurang maksimal.
2. Kelalaian pegawai dalam melaksanakan tugas.

3. Banyak masyarakat yang terbengkalai dalam mendapatkan pelayanan.
4. Pelayanan yang lama.
5. Banyak pegawai yang istirahat melampaui jam yang telah ditentukan.
6. Banyak pegawai yang keluar saat jam kerja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah ini, maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah peneliti yaitu adakah pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good governance* terhadap akuntabilitas kinerja kantor Kecamatan Cicendo Kota Bandung ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good governance* terhadap akuntabilitas kinerja kantor Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan yakni di antaranya:

1. Kegunaan akademis
 - a. Penelitian ini dapat memperkaya literatur dalam bidang karakteristik konsep kenegaraan dan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah.
 - b. Dapat dijadikan sebagai sumber pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu administrasi negara dan sebagai sarana informasi bagi para pembaca yang akan mengadakan penelitian mengenai bidang yang sama.
2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat dijadikan alat penyelesaian masalah apabila terjadi masalah dalam organisasi tentunya apabila berhubungan dengan Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan Akuntabilitas Kinerja.
- b. Memberikan masukan berupa ide atau gagasan kepada instansi untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas demi tercapainya tujuan dari organisasi tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah pemecahan suatu masalah yang dihadapi, secara ilmiah memerlukan kerangka pemikiran sebagai bahan acuan dalam memecahkan masalah tersebut yaitu pendapat para ahli dibidangnya dan kebenarannya. Dalam suatu instansi pemerintahan diperlukan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam bekerja tanpa terkecuali, oleh karena itu penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* sangat berguna untuk mengatasi rendahnya akuntabilitas kinerja yang terjadi.

Mencoba menjelaskan mengenai *good governance*, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, merumuskan arti *good governance* adalah sebagai berikut: “Kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

Lembaga Administrasi Negara (2000:6) mendefinisikan *Good Governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga "kesinergisan" interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*).

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Good Governance* memiliki sikap pelayanan yang adil sesuai dengan prosedur yaitu melayani dengan cepat, tepat, berkualitas, bertanggungjawab dan berorientasi kemasa depan dalam mengantisipasi perkembangan tantangan dan kesempatan.

Teori *Good Governance* yang dipakai untuk penelitian ini menurut UNDP (1997) yang dikutip oleh Sedarmayanti dalam bukunya *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik”* (2012:5) meliputi 9 dimensi diantaranya:

1. Partisipasi (*participation*)
2. Aturan hukum (*rule of law*)
3. Transparansi (*transparancy*)
4. Daya tanggap (*responsiveness*)
5. Berorientasi konsensus (*consensus orientation*)
6. Berkeadilan (*equity*)
7. Efektifitas dan efisiensi (*effectiveness dan efficiency*)
8. Akuntabilitas (*accountability*)
9. Visi strategis (*strategic vision*)

Menurut Hidayat (2007:38) akuntabilitas adalah elemen kunci *good governance*. Akuntabilitas tidak hanya diperlukan untuk membangun institusi pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan. Semua institusi ini harus dapat diukur akuntabilitasnya oleh *stakeholder* organisasi tersebut.

Akuntabilitas dalam buku Sedarmayanti yang berjudul *Good Govenance “Kepemerintahan Yang Baik”* mengandung arti adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah

untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang diterapkan.

Dimensi Akuntabilitas ada 5 menurut Rasul (2002:11), yaitu :

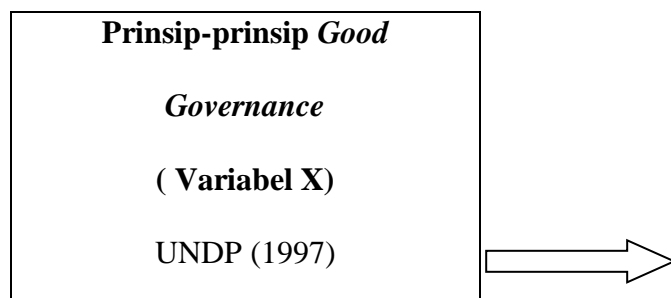
1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran
2. Akuntabilitas manajerial
3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan
5. Akuntabilitas financial

Adapun keterkaitan antara prinsip-prinsip *good governance* dengan akuntabilitas kinerja menurut Bhata (1996 : 151), yaitu : “bahwa unsur-unsur utama governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum ditambah dengan kompetensi manajemen dan hak-hak asasi manusia”

Jadi penerapan prinsip *Good Governance* dalam suatu organisasi sangat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi tersebut. Premis ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* yang baik akan dapat mengatasi rendahnya akuntabilitas kinerja, sementara penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* yang rendah dan buruk akan dapat mendorong terjadinya rendahnya akuntabilitas kinerja.

Gambar 1.1

Skema Kerangka Pemikiran



- Partisipasi (*participation*)
- Aturan hukum (*rule of law*)
- Transparansi (*transparancy*)
- Daya tanggap (*responsiveness*)
- Berorientasi konsensus
(*consensus orientation*)
- Berkeadilan (*equity*)
- Efektifitas dan efisiensi
(*effectiveness* dan *efficiency*)
- Akuntabilitas (*accountability*)
- Visi strategis (*strategic vision*)

Akuntabilitas

(Variabel Y)

Syahrudin Rasul (2002:8)

G. Hipotesis

Menurut Sugiono (2011:71) dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Sosial* Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan penelitian, belum jawaban empirik.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikemukakan di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H_0 = Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

- H_a = Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

